



PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hanifah Tri Indah¹, Dewa Perwantana Maha Putra², Maya Sartika³, Yulia Hanoselina⁴

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

¹hanifahtriindah00@gmail.com,

²dewaeagles@gmail.com,

³myasrtka.yahoo.com@gmail.com

⁴yuliahanoselina@fis.unp.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Etika administrasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nilai-nilai etika seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan menjadi pedoman moral bagi aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam mewujudkan *good governance* serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan kebijakan terkait etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika publik berkontribusi signifikan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penguatan budaya etika di seluruh lini pemerintahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Kata kunci: Etika administrasi publik, *good governance*, integritas, birokrasi, pelayanan publik.

ABSTRACT

Public administration ethics plays a vital role in establishing clean, transparent, and accountable governance. Ethical values such as integrity, responsibility, honesty, and justice serve as moral guidelines for public officials in carrying out their duties and authorities. This study aims to analyze the role of public administration ethics in achieving good governance and its contribution to improving the quality of public services and sustainable development. The research uses a descriptive qualitative approach through literature review, scientific journals, and policy analysis related to public administration ethics. The results indicate that ethical implementation significantly contributes to preventing abuse of power, strengthening bureaucratic accountability, and building public trust in the government. Strengthening ethical culture across all levels of government is a strategic step toward creating a professional, responsive, and integrity-based bureaucracy.

Keywords: *Public administration ethics, good governance, integrity, bureaucracy, public service*



PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai upaya membantu atau melayani secara intensif. Konsep administrasi mencakup dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi merujuk pada kegiatan pencatatan dan tata usaha, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah proses kerja sama rasional antar individu untuk mencapai tujuan tertentu. (Siagian, 2008 dalam Kusumah et al., 2024).

Kata publik bermakna umum, negara, atau masyarakat luas. Menurut Jefkins (2004) (dalam Febianti (2020)), publik adalah kelompok individu yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Menurut (Ruslan (1997) (dalam Akbar, Evadianti, dan Asniar (2021)), menegaskan bahwa publik merupakan kumpulan individu yang terikat oleh solidaritas tertentu. Pembahasan istilah administrasi publik sejalan dengan perjalanan panjang peradaban manusia yang menekankan kerja sama sosial sebagai fondasi aktivitas administratif. Seiring perkembangan zaman, administrasi publik berkembang menjadi bidang ilmu sosial terapan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang relatif baru dan sering dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Namun, dalam sistem pemerintahan modern, administrasi publik berkembang sebagai elemen dominan yang menopang perubahan menuju pemerintahan demokratis dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Wilson (1887) (dalam Hildawati et al. (2024)), administrasi publik adalah penerapan hukum secara terperinci dan sistematis untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Pemikiran klasik ini tetap relevan dalam tata kelola pemerintahan modern yang menekankan efektivitas dan akuntabilitas. Herbert A. Simon (1947) (dalam Zein dan Septiani (2023)), memandang administrasi sebagai kegiatan kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi publik merujuk pada aktivitas cabang eksekutif pemerintah di berbagai tingkatan dan Administrasi publik merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* yang berarti intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai upaya membantu atau melayani secara intensif. Konsep administrasi mencakup dua pengertian, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi merujuk pada kegiatan pencatatan dan tata usaha, sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah proses kerja sama rasional antar individu untuk mencapai tujuan tertentu. (Siagian, 2008 dalam Kusumah et al., 2024). Kata publik bermakna umum, negara, atau masyarakat luas. Menurut Jefkins (2004) (dalam Febianti (2020)), publik adalah kelompok individu yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Menurut (Ruslan (1997) (dalam Akbar, Evadianti, dan Asniar (2021)), menegaskan bahwa publik merupakan kumpulan individu yang terikat oleh solidaritas tertentu. Pembahasan istilah administrasi publik sejalan dengan perjalanan panjang peradaban manusia yang menekankan kerja sama sosial sebagai fondasi aktivitas administratif. Seiring perkembangan zaman, administrasi publik berkembang menjadi bidang ilmu sosial terapan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang relatif baru dan sering dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Namun, dalam sistem pemerintahan modern, administrasi publik berkembang sebagai elemen dominan yang menopang perubahan menuju pemerintahan demokratis dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Wilson (1887) (dalam Hildawati et al. (2024)), administrasi publik adalah penerapan hukum secara terperinci dan sistematis untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Pemikiran klasik ini tetap relevan dalam tata kelola pemerintahan modern yang menekankan efektivitas dan



akuntabilitas. Herbert A. Simon (1947) (dalam Zein dan Septiani (2023)), memandang administrasi sebagai kegiatan kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi publik merujuk pada aktivitas cabang eksekutif pemerintah di berbagai tingkatan dan menekankan rasionalitas objektif dalam pengambilan keputusan. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan teori administrasi publik modern yang menempatkan rasionalitas sebagai dasar dalam proses kebijakan publik. Luther Gulick (dalam Djafar dan Ap (2024)), menegaskan bahwa administrasi adalah penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemikiran tersebut tetap relevan dalam konteks tata kelola publik saat ini yang menuntut koordinasi lintas sektor dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, teori-teori klasik administrasi publik menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika manajemen pemerintahan kontemporer.

Administrasi publik berbeda dengan manajemen karena berfokus pada organisasi pemerintah dari tingkat lokal hingga nasional, mencakup birokrasi, kebijakan publik, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, serta good governance. Keban (2008) (dalam Nur, Akib, dan Niswaty (2022)), menyebut bahwa administrasi publik menunjukkan peran pemerintah sebagai regulator aktif yang mengatur dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Pemikiran ini masih relevan dengan konsep pemerintahan modern yang menempatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai inti tata kelola publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam peran etika dalam administrasi publik, terutama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Perhatian khusus diberikan pada etika sebagai landasan moral bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas, serta bagaimana penerapan prinsip etika dapat memperlancar proses pembangunan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan konsep, teori, serta penerapan etika administrasi publik dalam konteks mewujudkan good governance dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Artikel-artikel yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik etika administrasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 2019-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelaah isi dan konteks literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci serta hubungan antarvariabel yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan secara sistematis makna dan kecenderungan yang muncul dari sumber pustaka yang dikaji. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran etika administrasi publik dalam memperkuat good governance dan mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Etika administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari ajaran moral dan prinsip perilaku yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Bidang ini berfungsi memberikan pedoman nilai, norma, serta standar moral dalam pelaksanaan administrasi negara agar berjalan adil, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Thoha, 2019 dalam Hiplunudin, 2022).

Dengan demikian, etika administrasi publik tidak hanya sekadar teori moral, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam mengatur bagaimana aparatur negara berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab di tengah dinamika birokrasi modern. Sebagai disiplin studi, etika administrasi publik memiliki dua sisi: bagian dari ilmu administrasi publik dan juga terkait erat dengan filsafat moral, karena membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap pejabat publik dalam konteks tanggung jawab sosial (Pasolong, 2017 dalam Rokhman, Kurniasih, & Tobirin, 2023).

Dengan posisi ganda ini, etika administrasi publik menjadi jembatan antara teori manajerial dan nilai-nilai moral yang mendasari pengambilan keputusan publik. Etika administrasi publik menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip utama yang harus dijaga meliputi pelayanan kepada masyarakat, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Ketiga prinsip ini menjadi ukuran moral yang menentukan apakah suatu administrasi publik dapat dinilai baik atau tidak (Hayani, Puspitasari, & Nurhadi, 2024).

Prinsip-prinsip tersebut membentuk kerangka normatif yang menuntun perilaku pejabat publik agar selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks modern, penerapan etika publik menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem dan struktur, tetapi juga pada kualitas moral individu yang terlibat di dalamnya.

Secara praktis, etika administrasi publik berperan sebagai mekanisme pengendalian moral bagi aparatur negara agar tindakan dan kebijakannya selaras dengan kepentingan publik. Etika tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga sebagai standar evaluasi terhadap kebijakan publik (Suwarno, 2018 dalam Abiel & Masruri, 2023). Dengan kata lain, etika publik membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Etika administrasi negara juga berhubungan erat dengan etika politik dan etika profesi, karena seluruh tindakan pejabat publik mencerminkan kualitas moral pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan etika bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan demokratis. Pemerintahan yang etis harus menjunjung nilai keterbukaan, kejujuran, serta tanggung jawab terhadap rakyat (Riyadi, 2021).

Ketika prinsip etika diabaikan, muncul berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penguatan etika publik menjadi dasar penting dalam mencegah degradasi moral pemerintahan dan menjaga stabilitas tata kelola negara (Natalia, 2022). Etika administrasi publik juga berfungsi sebagai jembatan antara norma moral dan tindakan nyata dalam pelayanan publik. Dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan keadilan, aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan tidak diskriminatif. Penerapan etika administrasi publik yang konsisten akan menghasilkan tata pemerintahan yang profesional, efektif, dan dipercaya masyarakat (Hayani, Puspitasari, & Nurhadi, 2024).



KONSEP GOOD GOVERNANCE

Pada masa lampau, pemerintahan identik dengan kekuasaan absolut, kontrol ketat, dan dominasi negara terhadap masyarakat. Pemerintah menjadi pusat kekuasaan yang menentukan segala kebijakan melalui praktik administrasi publik yang bersifat top-down. Namun, seiring perkembangan teori politik dan administrasi, muncul paradigma baru yang menempatkan pemerintahan sebagai fasilitator bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah governance atau tata kelola pemerintahan, yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wardana, 2024).

Perubahan paradigma ini menandai pergeseran dari konsep “pemerintah sebagai penguasa” menjadi “pemerintah sebagai mitra masyarakat”. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peran pemerintah modern tidak lagi berpusat pada pengendalian dan kekuasaan semata, tetapi lebih pada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam sistem seperti ini, pemerintah bertugas menciptakan ruang dialog, mengakomodasi aspirasi publik, dan memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara terbuka.

Konsep governance menitikberatkan pada interaksi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Lebih jauh, governance tidak hanya terbatas pada lembaga formal, tetapi mencakup proses sosial dan politik yang mengatur hubungan antara berbagai aktor dalam masyarakat. Ini berarti tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan sinergi antara struktur formal negara dengan dinamika sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penggerak sekaligus mitra masyarakat dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Sudirman, 2025). Dengan adanya kemitraan ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai aktor aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan jalannya pemerintahan. Secara empiris, governance melibatkan tiga elemen utama yaitu partisipasi warga negara, hubungan sosial yang saling menguntungkan, dan kepemimpinan yang akuntabel.

Ketiga elemen tersebut membentuk fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintahan modern harus mendorong sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan berkeadilan (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan karena masyarakat turut dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Proses ini menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai bagian aktif dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan program pemerintahan.

Partisipasi publik dalam berbagai tahap kebijakan mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi yang sehat, di mana transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi menjadi kunci utama. Pemerintah yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat dapat lebih mudah membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas program pembangunan. Governance juga mencerminkan transformasi paradigma administrasi publik dari sistem birokratis ke arah model yang adaptif dan partisipatif. Sistem birokrasi tradisional yang bersifat hierarkis, kaku, dan tertutup mulai bergeser menuju model tata kelola yang lebih terbuka, fleksibel, dan inovatif. Dalam model governance, kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang esensial, sebab kompleksitas masalah publik tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Pemerintahan yang baik (good governance) mengedepankan nilai legitimasi, inovasi, dan responsivitas terhadap aspirasi publik (Simbolon et al., 2023).

Lebih dari itu, good governance juga menuntut adanya keseimbangan antara otoritas pemerintah dengan akuntabilitas publik. Pemerintah tidak lagi menjadi pengendali tunggal,



melainkan bagian dari jaringan kolaboratif yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Prinsip ini memperluas makna pemerintahan menjadi suatu proses sosial yang dinamis, di mana setiap aktor memiliki tanggung jawab moral dan fungsional dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini menekankan pemerataan hasil pembangunan secara adil antar generasi serta keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jayanthi et al., 2024). Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga moralitas dalam pengelolaan sumber daya.

Makna pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan generasi masa depan. Dalam pandangan ini, pembangunan tidak boleh dilakukan secara eksploitatif yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan harus memperhatikan batas-batas ekologis dan keadilan sosial. Keberlanjutan mengandung nilai-nilai moral seperti kepedulian, tanggung jawab, dan solidaritas lintas generasi, yang menuntut manusia untuk mengelola sumber daya secara bijak agar manfaatnya tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan, pemerataan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Zul Ammar et al., 2024). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab strategis untuk menyusun kebijakan yang menjamin keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan suatu negara dalam menjaga ekosistem, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah perlu menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka utama dalam perencanaan nasional dan daerah. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang integratif antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan green economy (ekonomi hijau), misalnya, menjadi salah satu strategi yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam konteks sosial, keberlanjutan juga berarti memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Dalam konteks ekonomi, keberlanjutan menjadi tanggung jawab moral dan ekologis. Generasi sekarang berkewajiban menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan daya dukung ekosistem serta keberlanjutan fungsi alam bagi kesejahteraan generasi mendatang (Rusadi et al., 2025).

Prinsip utama pembangunan berkelanjutan meliputi keadilan antar generasi, perlindungan ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat (Ainia et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi panduan moral dalam menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam. Keadilan antar generasi mengandung makna bahwa keputusan pembangunan hari ini tidak boleh mengorbankan hak generasi masa depan. Perlindungan ekosistem mengajarkan pentingnya menghormati sistem alam sebagai bagian dari kehidupan manusia.



Sementara itu, efisiensi sumber daya menekankan pengelolaan yang hemat, inovatif, dan bertanggung jawab agar tidak terjadi pemborosan dan kerusakan lingkungan yang tidak perlu. Secara praktis, implementasi pembangunan berkelanjutan menuntut kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekologi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan industri dijalankan dalam koridor keberlanjutan dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi masyarakat (Mannayong et al., 2024).

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat memiliki peran yang krusial karena keberhasilan program pembangunan bergantung pada kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Selain itu, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan. Praktik corporate social responsibility (CSR) yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi ramah lingkungan merupakan contoh nyata penerapan prinsip etika dalam pembangunan ekonomi.

Pendekatan seperti eco-efficiency dan circular economy juga menjadi wujud konkret integrasi antara efisiensi produksi dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian lingkungan akan menciptakan harmoni antara pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Keberlanjutan bukan hanya menjadi konsep kebijakan, melainkan juga nilai moral dan budaya yang harus ditanamkan dalam seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga bumi, tidak hanya demi keberlangsungan hidupnya sendiri, tetapi juga demi masa depan generasi berikutnya.

PERAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh efektivitas administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Pelayanan publik yang baik tidak hanya dilihat dari efisiensi dan kecepatan layanan, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai etika dan moral aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya. Etika menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Yanur, 2023).

Dengan demikian, etika publik berperan sebagai jiwa dari setiap aktivitas birokrasi, memastikan bahwa proses administrasi berjalan sesuai dengan prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti rendahnya integritas, kurangnya disiplin, dan lemahnya budaya etika dalam birokrasi. Penyimpangan etika seperti korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi, sehingga menghambat tercapainya good governance.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas moral aparatur menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi. Upaya memperbaiki hal ini harus dilakukan melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional (Taufiqurokhman & Rossa, 2025). Pemerintah perlu menegakkan prinsip-prinsip good governance yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan penerapan Standard Operating Procedures (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pelayanan. Kedua instrumen tersebut membantu menjaga konsistensi proses, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan penyimpangan birokrasi (Wahyuni, Prasetyo, & Arifin, 2024).



Penerapan standar pelayanan publik tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, mekanisme evaluasi berbasis survei kepuasan masyarakat dan sistem pengelolaan pengaduan publik menjadi bagian penting dari reformasi administrasi publik. Survei kepuasan masyarakat berfungsi menilai kualitas layanan dan mendorong peningkatan berkelanjutan, sementara sistem pengaduan membantu menciptakan pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap aspirasi publik (Suryana & Fauziah, 2025).

Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan secara objektif sekaligus memperbaiki kinerja aparatur. Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah dapat mengadopsi model kemitraan dengan sektor swasta melalui pendekatan seperti *contracting out* dan *public service franchising*, yang memungkinkan layanan tetap berkualitas dengan efisiensi biaya tinggi (Farhan, 2023). Melalui penerapan etika administrasi publik yang kuat, transparansi birokrasi, dan inovasi layanan, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Etika administrasi publik juga berperan krusial dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip keadilan dan nondiskriminasi. Dalam konteks pelayanan publik, aparatur yang beretika akan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses layanan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat.

Di era transformasi digital, peran etika semakin penting dalam mengelola layanan berbasis teknologi seperti *e-government* dan aplikasi pelayanan online. Etika digital mengharuskan aparatur untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat, mencegah penyalahgunaan informasi, serta memastikan aksesibilitas layanan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Penerapan etika dalam digitalisasi pelayanan publik dapat mengurangi celah korupsi, seperti markup proyek IT atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa digital.

Lebih jauh, etika administrasi publik berkontribusi terhadap pembentukan budaya organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi. Aparatur yang menjunjung nilai moral akan lebih termotivasi untuk berinovasi, berkolaborasi, dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi pengendali perilaku negatif, tetapi juga pendorong positif bagi peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

MORALITAS PEJABAT PUBLIK DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Etika pemerintahan berperan penting dalam membentuk integritas dan tanggung jawab moral para pejabat publik. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Etika bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga instrumen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Aparatur yang beretika mampu menjaga citra pemerintah, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan tata kelola yang bersih dari penyalahgunaan wewenang (Taufiqurokhman & Rossa, 2025). Etika dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan nilai yang mengarahkan perilaku pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Prinsip-prinsip etika tidak hanya mencegah tindakan koruptif, tetapi juga membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks modern, etika pemerintahan menjadi dasar dari terciptanya *good governance* yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Integritas yang tinggi di kalangan pejabat publik akan memperkuat sistem birokrasi yang bersih, efisien, dan responsif



terhadap aspirasi masyarakat. Prinsip-prinsip etika pemerintahan menuntut pejabat publik untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberanian menegakkan kebenaran menjadi pilar penting dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik (Choirulsyah & Azhar, 2024). Dalam hal ini, moralitas pejabat publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari ketulusan dalam mengabdikan kepada rakyat. Artinya, pejabat publik yang beretika tidak hanya menjalankan tugas karena kewajiban administratif, melainkan karena kesadaran moral untuk melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan empati. Lebih jauh, etika pemerintahan berperan dalam membangun budaya organisasi yang sehat di lingkungan birokrasi. Pejabat publik yang menjadikan etika sebagai landasan kerja akan lebih mudah menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, mencegah konflik kepentingan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketika nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan tertanam kuat, maka setiap keputusan kebijakan akan dilandasi oleh pertimbangan moral, bukan hanya kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek. Pemerintah dituntut tidak hanya mencegah kesalahan, tetapi juga menegakkan kebenaran melalui kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pembangunan nasional, etika pemerintahan berfungsi sebagai fondasi bagi efektivitas kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pelanggaran etika seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya akuntabilitas dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Karena itu, penerapan kode etik dan sistem pengawasan yang ketat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Selain aspek moral, penerapan etika juga memiliki dimensi strategis dalam pengambilan kebijakan. Etika membantu pejabat publik mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Keputusan yang berlandaskan etika memperkuat kepercayaan publik karena menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Di tingkat daerah, efektivitas pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan e-Planning terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi proses perencanaan (Ruhana, 2025).

Dengan teknologi tersebut, kebijakan pembangunan dapat lebih mudah diawasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi bentuk aktualisasi nilai etika dalam konteks modern, karena mencerminkan keterbukaan, tanggung jawab publik, dan keadilan akses terhadap informasi. Selain itu, pelaksanaan etika pemerintahan di daerah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pengawasan publik melalui mekanisme partisipatif, seperti forum konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), menjadi sarana untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Etika yang diterapkan secara konsisten pada setiap tingkatan pemerintahan akan membentuk sistem birokrasi yang adaptif, responsif, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Moralitas tinggi pejabat publik juga berdampak langsung pada keberhasilan program pembangunan berkelanjutan. Pejabat yang berintegritas akan memprioritaskan proyek-proyek yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan



pemerataan akses pendidikan serta kesehatan, sesuai dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebaliknya, rendahnya moralitas sering kali menyebabkan penyimpangan anggaran, proyek mangkrak, atau kebijakan yang hanya menguntungkan elit tertentu, sehingga menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, etika pemerintahan bukan hanya pedoman moral, tetapi juga strategi praktis untuk memperkuat tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintah yang beretika dan transparan akan lebih dipercaya masyarakat serta mampu menciptakan kebijakan publik yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Etika menjadi jembatan antara moralitas dan profesionalisme birokrasi, yang pada akhirnya mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga bijaksana secara moral.

TANTANGAN DAN ISU ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Etika administrasi publik berperan penting dalam mencegah hal ini dengan menanamkan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas kepada pejabat publik. Ketika aparaturnya menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, hal ini memperkuat sistem pemerintahan yang bersih serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat (Yudianto et al., 2024).

Korupsi dalam konteks politik dan birokrasi sama-sama memiliki dampak negatif terhadap efektivitas pemerintahan. Korupsi politik muncul ketika pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sedangkan korupsi birokrasi terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kedua bentuk korupsi ini menurunkan efisiensi administrasi dan memperbesar kesenjangan sosial (Nurmitae, 2024). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga hukum, melainkan juga bagian integral dari reformasi etika birokrasi.

Etika yang kuat menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah perlu memastikan adanya pedoman etika yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Ketiadaan aturan etika atau lemahnya penegakan moralitas dalam birokrasi dapat memperparah korupsi serta menggerus legitimasi publik terhadap pemerintah (Taufiqurokhman et al., 2024). Hubungan antara etika dan kepercayaan publik bersifat timbal balik tata kelola yang beretika meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik memperkuat legitimasi sistem pemerintahan.

Meskipun reformasi birokrasi terus dilakukan, patologi birokrasi masih menjadi tantangan serius dalam administrasi publik Indonesia. Patologi ini mencakup perilaku disfungsional seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakhadiran tanpa izin, penyimpangan prosedur, serta lemahnya kedisiplinan dan koordinasi kerja (Santika & Dewi, 2023). Faktor penyebabnya antara lain gaya kepemimpinan yang tidak partisipatif, rendahnya kompetensi pegawai, serta pelanggaran terhadap norma dan regulasi (Hartono et al., 2024).

Selain itu, tantangan etika di era digitalisasi semakin kompleks dengan munculnya isu seperti penyalahgunaan data pribadi masyarakat, kebocoran informasi sensitif, dan manipulasi informasi publik melalui platform digital. Aparatur publik yang kurang memahami etika digital berisiko melanggar privasi warga atau menyebarkan informasi yang bias, sehingga merusak kredibilitas pemerintahan. Di samping itu, konflik kepentingan (*conflict of interest*) sering kali menjadi pemicu pelanggaran etika, terutama ketika pejabat publik memiliki hubungan bisnis pribadi yang bertabrakan dengan tugas negara. Fenomena ini semakin marak di tingkat daerah, di mana pengawasan sering kali lemah dan tekanan politik lokal kuat.



Isu lain yang signifikan adalah budaya patrimonialisme dan nepotisme yang masih mengakar di beberapa instansi pemerintahan. Praktik ini menghambat prinsip meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi ASN, sehingga menurunkan kualitas dan integritas birokrasi secara keseluruhan. Rendahnya sanksi terhadap pelanggaran etika juga menjadi faktor penghambat, di mana banyak kasus hanya berakhir dengan mutasi atau sanksi ringan tanpa efek jera yang nyata.

Untuk mengatasinya, diperlukan transformasi budaya birokrasi berbasis etika dan profesionalisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dibekali pelatihan integritas, sistem evaluasi kinerja berbasis merit, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, sebagaimana diterapkan di beberapa daerah dalam mencegah patologi birokrasi (Fadillah & Nuraini, 2025).

Dengan memperkuat nilai-nilai etika, meningkatkan profesionalisme aparatur, dan memperluas pengawasan berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memperbaiki birokrasi, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

KONTRIBUSI ETIKA TERHADAP KELANCARAN PEMBANGUNAN

Teori pembangunan terus berkembang seiring dengan perubahan paradigma dan kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang kini semakin menonjol adalah keterpaduan antara dimensi etika dan filsafat dalam proses pembangunan. Etika pembangunan menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pembangunan berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia dan pelestarian nilai moral (Suriadi & Mulyono, 2024). Dengan kata lain, pembangunan bukan hanya proses ekonomi, tetapi juga proses moral dan sosial yang menuntut keseimbangan antara kemajuan material dan nilai kemanusiaan.

Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi proses moral yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan bergeser dari pendekatan ekonomi semata menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini menekankan pemerataan hasil pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dimensi moral menjadi penting karena tanpa etika, kebijakan pembangunan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan (Utomo, 2025). Oleh sebab itu, pembangunan modern harus mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual untuk menjamin keadilan antargenerasi. Indikator keberhasilan pembangunan kini tidak lagi terbatas pada Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mengacu pada indeks sosial seperti Human Development Index (HDI) dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digunakan secara global (Nasution & Rachmawati, 2022).

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kemajuan teknologi, pemerataan ekonomi, dan pelestarian nilai budaya serta lingkungan hidup. Nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat perlu dilestarikan agar modernisasi tidak mengikis identitas sosial bangsa. Secara global, pembangunan tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan kemakmuran material, tetapi juga memperluas kebebasan dan partisipasi manusia dalam kehidupan publik. Etika pembangunan yang berorientasi pada tanggung jawab sosial menolak eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Suriadi & Mulyono, 2024).



Etika administrasi publik memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pembangunan melalui penciptaan lingkungan birokrasi yang stabil, dapat diprediksi, dan bebas dari penyimpangan. Aparatur yang berintegritas tinggi cenderung membuat keputusan kebijakan yang rasional, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, sehingga proyek-proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien tanpa hambatan korupsi atau konflik kepentingan. Selain itu, etika yang kuat mendorong alokasi anggaran yang adil dan transparan, memastikan bahwa dana pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat sasaran dan digunakan untuk tujuan yang semestinya.

Di tingkat implementasi, etika administrasi publik memfasilitasi koordinasi lintas sektor yang lebih baik. Nilai-nilai seperti tanggung jawab dan akuntabilitas mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan. Contohnya, dalam proyek infrastruktur berkelanjutan, aparatur yang beretika akan memprioritaskan studi kelayakan lingkungan dan partisipasi masyarakat, sehingga mengurangi risiko konflik sosial dan kegagalan proyek. Hal ini pada akhirnya mempercepat proses pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutannya.

Lebih lanjut, etika publik berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi domestik maupun asing. Investor cenderung memilih wilayah dengan tata kelola yang bersih dan berintegritas karena mengurangi risiko korupsi dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penerapan etika yang konsisten dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Etika juga mendukung inovasi dalam pembangunan, seperti pemanfaatan teknologi hijau dan ekonomi sirkular, karena aparatur yang bermoral tinggi lebih terbuka terhadap ide-ide baru yang berpihak pada kepentingan bersama.

Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Etika pembangunan juga berfungsi sebagai dasar untuk menilai keadilan distribusi hasil pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan yang berkeadilan sosial, nondiskriminatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Utomo, 2025). Prinsip-prinsip etika, partisipasi, dan keadilan sosial menjadi inti dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

Etika dalam administrasi publik berfungsi sebagai pedoman moral dan kebijakan bagi para administrator negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Penerapan nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Etika yang kuat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan profesionalisme tinggi. Tanpa penerapan etika yang konsisten, konsep good governance hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi.

Lebih jauh lagi, implementasi etika dalam administrasi publik memiliki implikasi strategis terhadap kinerja lembaga pemerintahan. Ketika pejabat publik menjadikan etika sebagai dasar pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Etika juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan dalam birokrasi, sehingga setiap tindakan aparatur memiliki batas tanggung jawab yang jelas terhadap hukum, nilai, dan norma sosial.

Dalam konteks ini, etika publik bukan sekadar norma perilaku individu, tetapi menjadi sistem nilai yang menjwai seluruh aktivitas birokrasi. Dalam praktik pelayanan publik, etika administrasi publik berperan penting dalam mengarahkan perilaku aparatur agar mengutamakan



kepentingan masyarakat. Nilai-nilai moral seperti keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Etika juga menuntun pejabat publik untuk memperlakukan masyarakat secara adil, sopan, dan transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketika etika dijadikan landasan dalam bekerja, kualitas pelayanan meningkat dan kinerja birokrasi menjadi lebih efektif serta efisien. Selain menciptakan pelayanan publik yang responsif, etika juga memiliki dimensi struktural dalam memperkuat akuntabilitas institusi.

Dalam tataran kebijakan, penerapan etika publik dapat diwujudkan melalui mekanisme kode etik ASN, pembentukan dewan etik di setiap lembaga pemerintahan, serta sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Ketiga instrumen tersebut memperkuat budaya organisasi yang sehat dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi tuntunan moral individu, tetapi juga menjadi instrumen kelembagaan dalam menjaga integritas organisasi publik. Etika administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter aparatur. Aparatur publik yang menjunjung tinggi nilai moral akan menunjukkan disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya (Rahmadani & Syahputra, 2022).

Prinsip-prinsip etika seperti tanggung jawab, pengabdian, kepekaan sosial, kesetaraan, dan keadilan kini semakin relevan diterapkan untuk menghadapi kompleksitas birokrasi modern. Dalam era digitalisasi pemerintahan, penerapan etika publik juga harus menyesuaikan dengan tantangan baru seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan transparansi informasi publik. Etika digital bagi aparatur publik menjadi penting agar pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi atau manipulasi data publik. Dengan memadukan etika tradisional dan etika digital, birokrasi dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berpihak pada nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik memiliki korelasi positif dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Studi Hayani et al. (2024) dan Kurniasih (2024) menegaskan bahwa etika publik berperan penting dalam mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, etika administrasi publik bukan sekadar konsep normatif, tetapi instrumen praktis yang membentuk perilaku, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menekankan perlunya integrasi etika dalam setiap tahap siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan berbasis etika melalui pendekatan *value-based policy making*, di mana nilai moral menjadi kriteria utama dalam analisis dampak kebijakan. Hal ini akan meminimalkan risiko kebijakan yang diskriminatif atau berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman perlu didukung dengan mandat yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran etika ringan sekalipun, sehingga efek jera dapat tercipta secara dini.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, implikasi kebijakan mencakup penyusunan regulasi yang mewajibkan penilaian etika (*ethical impact assessment*) dalam setiap proyek pembangunan besar, terutama yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Integrasi etika dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilakukan melalui penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan prinsip integritas dan keadilan sosial.



Rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan meliputi: Penguatan pendidikan etika dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN, termasuk modul etika digital dan anti-korupsi secara berkala, Penerapan sistem meritokrasi yang ketat dalam rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan untuk mencegah nepotisme, Pengembangan platform digital terintegrasi untuk pelaporan pelanggaran etika dengan perlindungan whistleblower yang lebih baik, Kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil untuk monitoring independen terhadap implementasi etika di birokrasi; serta (5) Pemberian insentif bagi instansi dan individu yang menunjukkan prestasi tinggi dalam penerapan etika, seperti penghargaan integritas tahunan.

Dengan menerapkan implikasi dan rekomendasi ini secara konsisten, pemerintah Indonesia dapat mempercepat transformasi menuju birokrasi yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga bermoral tinggi dan benar-benar melayani rakyat. Penguatan budaya etika yang menyeluruh akan menjadi kunci utama dalam mencapai good governance dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif serta berkeadilan.

PENUTUP

Etika administrasi publik merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai etika seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan profesionalisme menjadi pedoman moral yang esensial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sepanjang pembahasan dalam artikel ini, telah diuraikan bahwa etika administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai norma perilaku individu, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi.

Penerapan etika yang konsisten terbukti mampu mencegah penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Lebih jauh lagi, etika publik menjadi jembatan penting antara tata kelola yang baik dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai landasan kebijakan, pemerintah dapat memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Penguatan budaya etika di seluruh lini birokrasi melalui pendidikan karakter, pelatihan integritas, penegakan kode etik, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil merupakan langkah krusial untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Di era digitalisasi dan kompleksitas tantangan global saat ini, etika administrasi publik semakin relevan sebagai pilar moral yang menjamin bahwa inovasi teknologi dan kebijakan publik tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta keberlanjutan bangsa.

Akhirnya, pencapaian good governance dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak akan terwujud tanpa komitmen kuat terhadap etika administrasi publik. Dengan menanamkan dan menegakkan nilai-nilai etika secara menyeluruh, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya efisien dan profesional secara administratif, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan benar-benar melayani kepentingan masyarakat luas. Upaya ini diharapkan menjadi legacy bagi generasi mendatang dalam membangun negara yang adil, makmur, dan lestari.



DAFTAR PUSTAKA

- Choirulsyah, D., & Azhar, M. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 195-203.
- Hayani, R., Puspitasari, A., & Nurhadi, D. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 77-89.
- Hiplunudin, A. (2022). *Etika administrasi negara: Kajian moral penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik*. Penerbit Andi.
- Jayanthi, N., et al. (2024). Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Analisis Kinerja dan Tantangan. *International Research Journal of Economics and Management Studies (IRJEMS)*, 3(1), 153-167.
- Kurniasih, D. (2024). Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi*, 13(1), 55-69.
- Mannayong, J., Rahman, A., & Dewi, T. (2024). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 102-118.
- Nasution, R., & Rachmawati, I. (2022). Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
- Nuraini, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135-161.
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, H. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 45-58.
- Rokhman, B., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik dalam Pencapaian Good Governance di Indonesia. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(7), 915-924.
- Taufiqurokhman, T., & Rossa, Z. Z. (2025). Etika Administrasi Publik Pilar Utama Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi Publik (JIPIKOM)*, 11(1), 51-64.
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600-608.
- Yudianto, E., et al. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 17(1).
- Zul Ammar, Z., Hidayati, R., & Fauzan, R. (2024). Ekonomi Hijau sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 8(1), 20-35.